

Katalog BPS: 4601008.33



BOOKLET
INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
JAWA TENGAH
2015



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH

The background of the cover features the Garuda Pancasila emblem, the national symbol of Indonesia, positioned at the top center. Below the emblem, several hands are raised in a fist, symbolizing protest or solidarity. The entire scene is set against a dark, textured background that resembles a map of Indonesia. A large, dark, irregular shape, resembling a torn piece of paper or a shadow, is positioned behind the text, creating a sense of depth and focus.

BOOKLET
INDEKS
DEMOKRASI INDONESIA
JAWA TENGAH
2015

BOOKLET INDEKS DEMOKRASI INDONESIA JAWA TENGAH 2015

ISBN	:	978-602-0916-90-3
No. Publikasi	:	33520.1618
Katalog BPS	:	4601008.33
Ukuran Buku	:	10,5 cm x 14,8 cm
Jumlah Halaman	:	vi + 33 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Pelita

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Booklet Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah Tahun 2015 menyajikan data seputar aspek, variable dan indikator IDI di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisa secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Materi yang disajikan dalam booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variable, dan indikator IDI. Diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta gambaran ringkas agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat.

Semarang, November 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



DR. Margo Yuwono, S.Si, M.Si

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Apa itu IDI?	1
II. Mengapa IDI Diperlukan?	3
III. Apa Manfaat IDI?	5
IV. Bagaimana Metodologi IDI?	7
V. Gambaran Umum IDI Indonesia	15
VI. IDI Jawa Tengah 2014	19
VII. Penutup	31

I. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia maka sejak tahun 2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama stakeholder lain seperti Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), United Nations Development Programme (UNDP) dan Tim Ahli yaitu Prof. Maswadi Rauf (UI), Prof. Musdah Mulia (UIN Syarif Hidayatullah), Dr. Syarif Hidayat (LIPI), dan Dr. Abdul Malik Gismar (Universitas Paramadina) merumuskan pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pegeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naikturunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi dan hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi, IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.

II. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lebih lima belas tahun berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauhmana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi? Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau factor-faktor penyumbang-nya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya, dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik Sehingga, langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

III. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat. Utamanya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/ demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

IV. Bagaimana Metodologi IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Koding surat kabar dan koding dokumen

Semua peristiwa yang terkait indikator IDI yang diberitakan periode Januari – Desember 2015 pada surat kabar yang telah dipilih, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. *Review* dokumen, semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

FGD berfungsi sebagai untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif . Dalam FGD, hasil *review* surat kabar dan dokumen dijadikan acuan

untuk mengklarifikasi berita/data, dan menggali data yang sangat mungkin luput diberitakan oleh surat kabar.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2015

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	2. Kebebasan Berpendapat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	3. Kebebasan Berkeyakinan	1. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		2. Tindakan/ Pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		3. Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	1. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
		2. Tindakan/ pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
		3. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2015 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
2. Hak-Hak Politik	1. Hak Memilih dan Dipilih	1. Hak memilih atau dipilih terhambat
		2. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
		3. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		4. <i>Voters turnout</i>
		5. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi
3. Lembaga Demokrasi	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	1. Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan
		2. Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	1. Keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan pemilu
		2. Kecurangan dalam penghitungan suara
3. Lembaga Demokrasi	2. Peran DPRD	1. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
		2. Perda yang merupakan inisiatif DPRD
		3. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2015 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
3. Lembaga Demokrasi	3. Peran Partai Politik	1. Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu
		2. Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	1. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
		Laporan dan berita Penggunaan Fasilitas Pemerintah untuk Kepentingan calon/parpol tertentu dalam Pemilu Legislatif
		2. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
	5. Peran Peradilan yang Independen	Laporan dan berita Keterlibatan PNS dalam Kegiatan Parpol pada Pemilu Legislatif
		1. Keputusan Hakim yang Kontroversial
2. Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi		

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan koding surat kabar dan koding dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil koding surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada koding Koran atau koding dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan skoring data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen disbanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoretik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya,

untuk memberi makna lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Pada 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” **sebelumnya** “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” **sebelumnya** “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

V. Gambaran Umum IDI Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional 2015 mencapai **72,82** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini relatif tetap dibandingkan dengan IDI 2014 yang capaiannya sebesar 73,04. Meskipun sedikit mengalami perubahan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”.

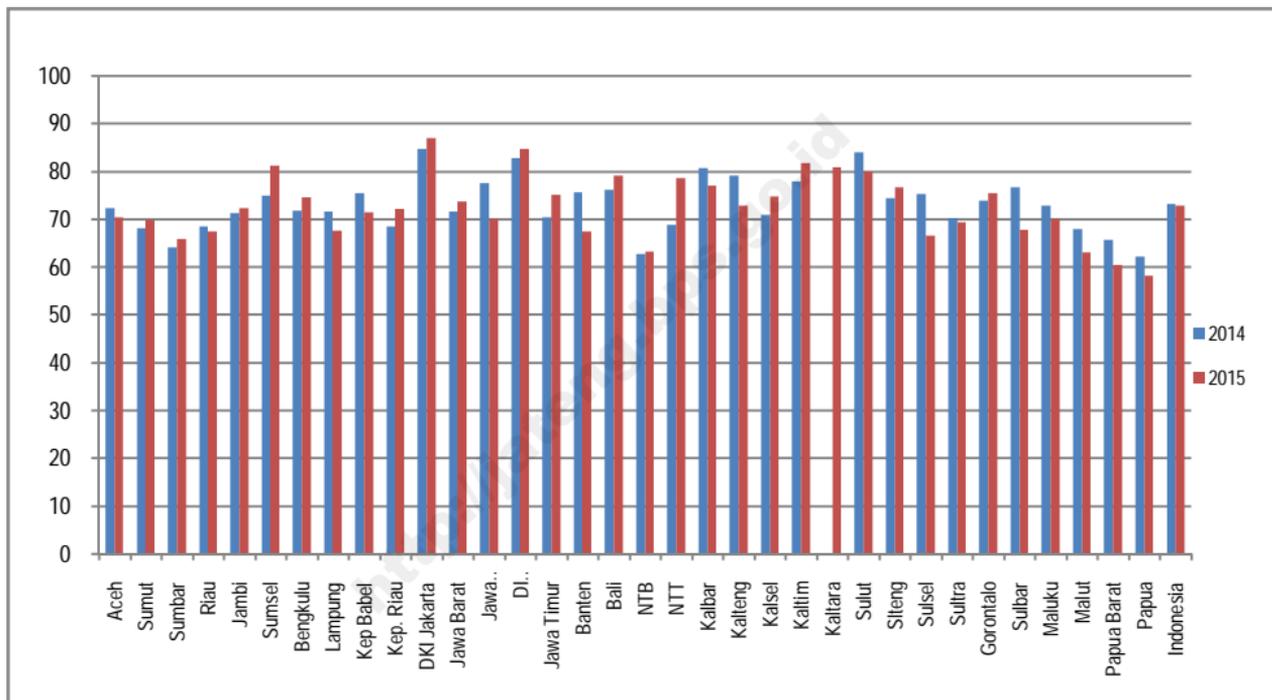
Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata nasional 80,30; aspek Hak-hak Politik sebesar 70,63; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 66,88.

Terdapat empat provinsi yang berada di level kinerja demokrasi dari kategori “baik” yakni DKI Jakarta naik dari 84,70 pada 2014 menjadi 86,87 pada 2015. Tiga provinsi lainnya adalah DI Yogyakarta naik dari 82,71 pada 2014 menjadi 84,65 pada 2015; Sumatera Selatan naik dari 74,82 pada 2014 menjadi 81,09 pada 2015 dan Kalimantan Utara yang sebesar 80,84 pada 2015.

Sebanyak 29 provinsi lainnya berada dalam kinerja demokrasi kategori “sedang”, dan pada 2015 hanya 1 provinsi yakni Papua yang masuk dalam kategori “buruk”. Hal ini memberikan indikasi kinerja demokrasi yang merata di hampir seluruh wilayah Indonesia. Meski pada IDI 2014 tidak ada provinsi berada pada kategori “buruk”.

<http://jateng.bps.go.id>

Grafik 1. Perkembangan IDI berdasarkan Provinsi, 2014-2015



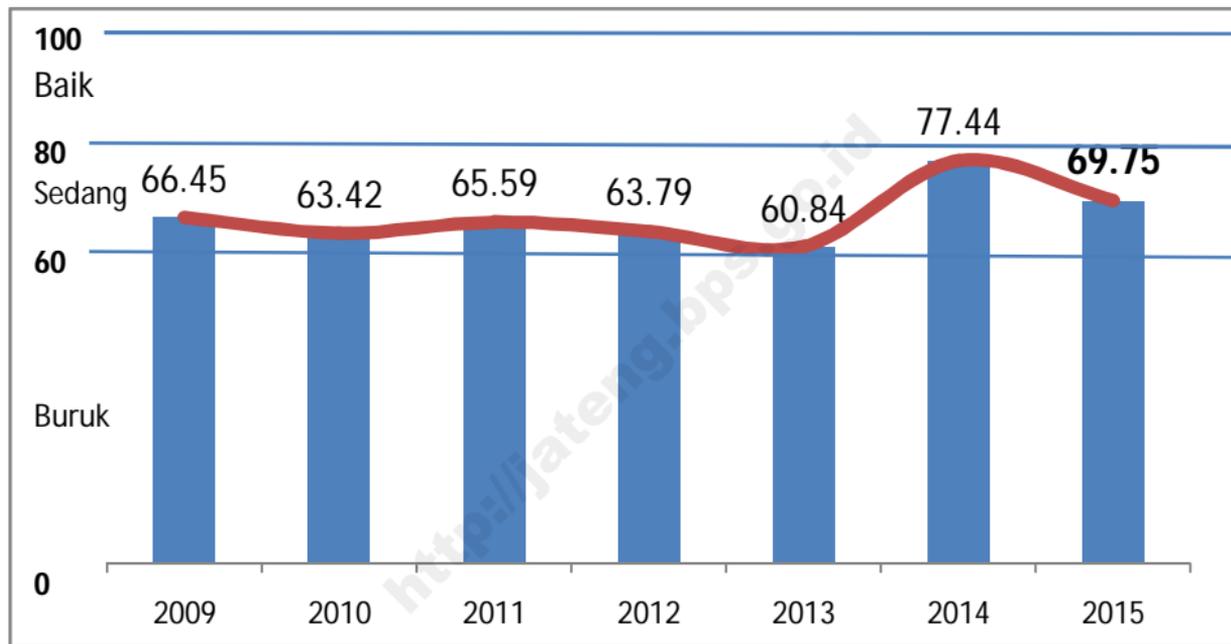
VI. IDI Jawa Tengah 2015

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah 2015 sebesar **69,75** dari skala 0 sampai 100, angka ini turun **7,69** poin dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2014 sebesar 77,44. Meskipun mengalami penurunan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI dari 2009 hingga 2015 mengalami fluktuasi. Pada awal mula IDI dihitung tahun 2009 IDI sebesar 66,45. Kemudian turun pada tahun 2010 sebesar 63,42, lalu naik pada tahun 2011 menjadi 65,59; kemudian turun pada tahun 2012 menjadi 63,79; 2013 sebesar 60,84; 2014 naik sebesar 77,44, dan 2015 turun menjadi 69,75. Nilai IDI 2014 merupakan capaian tertinggi selama 7 tahun penghitungan IDI (2009-2015).

Angka IDI 2015 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil sebesar 79,44; aspek Hak-hak Politik sebesar 67,28; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 61,48.

Grafik 2. Perkembangan IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2015



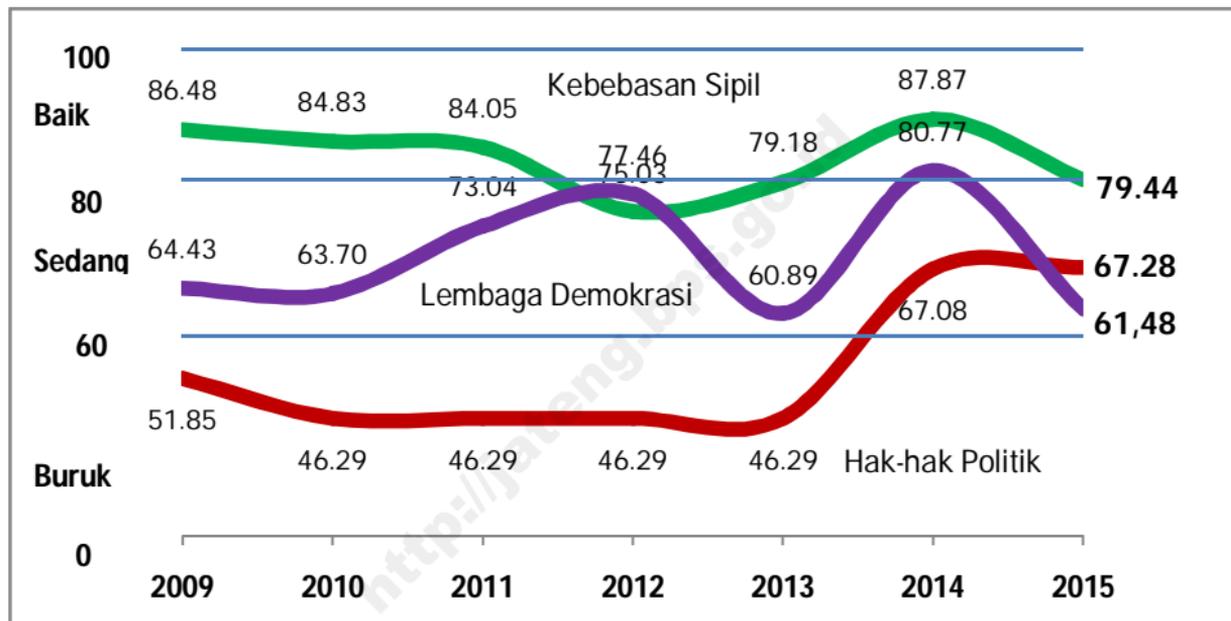
Apabila dimaknai secara kategori “baik”, “sedang”, dan “buruk”, sejak 2014 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012, 2013, dan 2015 aspek ini menjadi kategori “sedang”. Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013 stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2015 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”. Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2015 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”.

Selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun IDI dihitung, baru pertama kali ini indeks aspek Hak-hak Politik lebih tinggi dibandingkan aspek Lembaga Demokrasi. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada posisi di atas aspek lainnya. Pada tahun 2015 merupakan waktu di mana rentang nilai ketiga aspek paling rapat, yakni antara 61,48 – 79,44. Pada tahun-tahun sebelumnya rentang

nilainya lebih lebar. Ini terjadi karena terjadinya peningkatan aspek Hak-hak Politik yang cukup bermakna. Indeks aspek Hak-hak Politik mengalami peningkatan 0,20 poin. Sementara nilai aspek Kebebasan Sipil dan Lembaga Demokrasi mengalami penurunan masing-masing sebesar 8,43 dan 19,29 poin.

<http://jateng.bps.go.id>

Grafik 3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2015

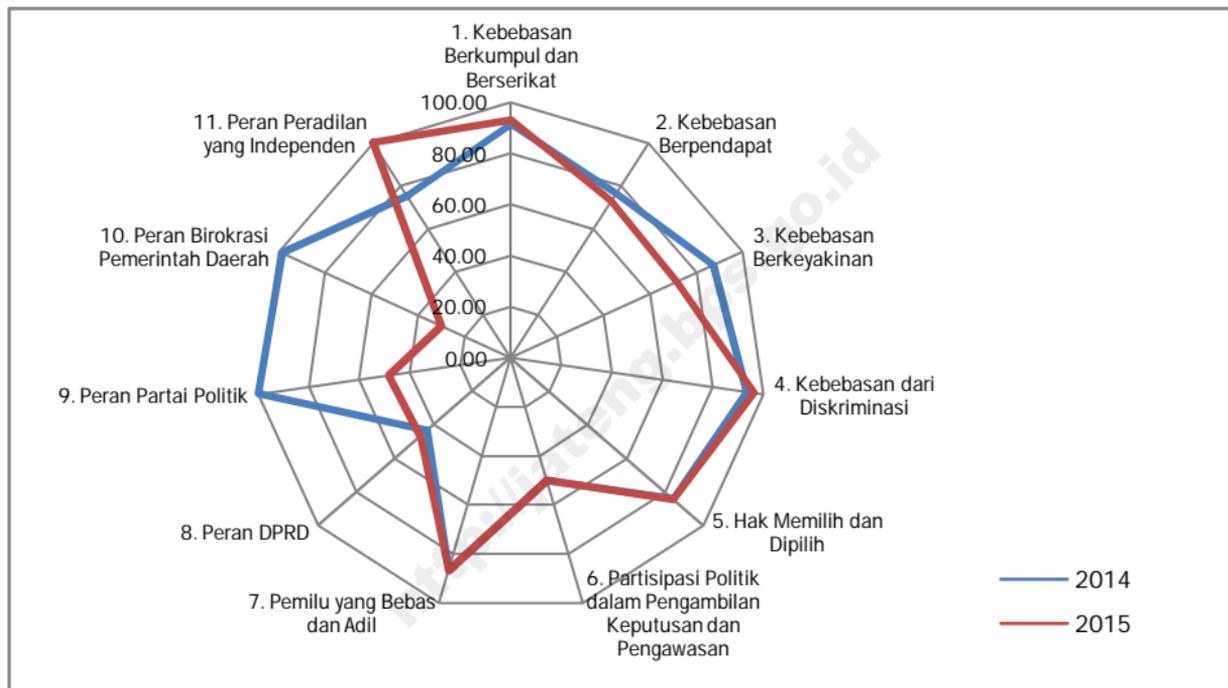


Menurut nilai indeks variabel IDI 2014 terdapat lima variabel yang mengalami peningkatan indeks, empat variabel mengalami penurunan dan dua variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2014. Dari lima variabel yang mengalami kenaikan, satu diantaranya meningkat cukup berarti yaitu pada kenaikan indeks variabel Peran Peradilan yang Independen. Grafik 4 memperlihatkan variabel Peran Peradilan yang Independen meningkat dari kategori sedang menjadi baik, dari 75,00 pada 2014 menjadi 100,00 pada 2015. Selebihnya meningkat tidak cukup bermakna, nilai indeks masih pada kategori yang sama.

Dari empat variabel yang mengalami penurunan, tiga diantaranya menurun cukup bermakna. Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun sangat tajam sebesar 68,35 poin dari 98,48 pada 2014 menjadi 30,13 pada 2015. Akibat penurunan tersebut kategori indeks variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merosot dari kategori "baik" menjadi "buruk". Penurunan ini sejatinya imbas dari perubahan indikator penyusunnya. Pada tahun 2005 dilakukan evaluasi IDI yang salah satunya mengevaluasi komponen IDI. Hasilnya merekomendasi mulai IDI

2015 perlu dilakukan penggantian pada indikator 25 dan 26. Dengan demikian komponen variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah berubah. Selain variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, variabel Peran Partai Politik dan Kebebasan Berkeyakinan juga mengalami penurunan yang berarti. Capaian indeks variabel Peran Partai Politik dari kategori “baik” pada 2014 (99,96) menjadi kategori “buruk” pada 2015 (48,49). Sedangkan variabel Kebebasan Berkeyakinan dari kategori “baik” pada 2014 (87,06) menjadi kategori “sedang” pada 2015 (71,58). Angka perkembangan indeks variabel secara rinci dapat dilihat pada Tabel 1

Grafik 4. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Tengah, 2014-2015



Tabel 1. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2009 - 2015

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kebebasan Sipil		86,48	84,83	84,05	75,03	79,18	87,87	79,44
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	78,75	55,00	51,88	81,88	35,00	91,25	92,97
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	50,00	50,00	90,00	40,00	90,00	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	0,00	90,00	65,00	25,00	0,00	100,00	43,75
II	Kebebasan Berpendapat	50,02	0,00	74,97	47,20	61,09	76,12	72,89
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	40,00	0,00	90,00	56,67	73,33	73,33	87,50
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
III	Kebebasan Berkeyakinan	93,22	96,42	86,44	75,32	81,31	87,06	71,58
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	100,00	100,00	100,00	91,30	91,30	83,70
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	87,50	100,00	75,00	40,00	100,00	87,50	68,75
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	70,00	80,00	40,00	0,00	30,00	70,00	25,00

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kebebasan Sipil		86,48	84,83	84,05	75,03	79,18	87,87	79,44
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	86,93	100,00	93,05	82,75	96,53	93,23	96,43
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	6,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	75,00	77,50	87,50	87,50	87,50
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	66,67	100,00	90,00	100,00

Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2009 - 2015

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Hak-Hak Politik		51,85	46,29	46,29	46,29	46,29	67,08	67,28
I	Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	42,59	42,59	42,59	84,16	84,57
1	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	34,62	34,62	34,62	34,62	34,62	92,95	92,95
2	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	60,00	60,00
3	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	89,65	89,65
4	<i>Voters turnout</i>	71,26	71,26	71,26	71,26	71,26	73,24	73,24
5	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	76,67	80,00
II	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	61,11	50,00	50,00	50,00	50,50	50,50	50,50
6	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	69,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	52,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2009 - 2015

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		64,43	63,70	73,04	77,46	60,89	80,77	61,48
I	Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	94,94	94,94	94,94	86,71	86,71
1	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu	100,00	100,00	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00
2	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87	89,87	89,87	89,87	73,42	73,42
II	Peran DPRD	69,88	42,60	69,48	41,01	43,32	43,22	46,75
3	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	100,00	63,54	100,00	52,10	54,97	54,81	63,17
4	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	25,00	0,00	18,18	38,46	41,18	41,18	28,57
5	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	0,00	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
III	Peran Partai Politik	5,01	57,35	98,06	100,00	100,00	99,96	48,49
6	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	0,00	57,14	100,00	100,00	100,00	100,00	42,86
7	% perempuan dalam kepemimpinan partai politik	50,07	59,22	80,59	100,00	100,00	99,64	99,19

Tabel 3. (Lanjutan)

No	Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		64,43	63,70	73,04	77,46	60,89	80,77	61,48
IV	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	80,30	80,30	80,30	98,48	30,13
8	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	-	-	-	-	-	26,32
	Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif	90,90	90,90	90,90	90,90	90,90	100,00	-
9	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	-	-	-	-	33,33
	Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif	69,70	69,70	69,70	69,70	69,70	96,97	-
V	Peran Peradilan Yang Independen	75,00	50,00	32,50	75,00	0,00	75,00	100,00
10	Keputusan hakim yang kontroversial	50,00	100,00	65,00	50,00	0,00	50,00	100,00
11	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00

VII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari Pokja IDI dalam mensosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat. Sehingga dengan demikian diharapkan data IDI yang dihasilkan merupakan data IDI yang akurat sehingga pemerintah diharapkan dapat melaksanakan berbagai program pembangunan yang lebih tepat sasaran.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : bps3300@bps.go.id

ISBN 978-602-0916-90-3



9 786020 916903